



Pilkada Jogja 2017

Kampanye Disediakan

Rp 3 Miliar

TEGALREJO -- Sekitar 18 persen dari total anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta 2017 akan dialokasikan untuk keperluan fasilitasi kampanye pasangan calon kepala daerah.

"Kami mengasumsikan ada lima pasang calon kepala daerah yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 dengan kebutuhan dana kampanye sekitar Rp3 miliar atau 18 persen dari total anggaran Rp14,9 miliar," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Wawan Budianto di kantor KPU Yogyakarta, Kamis (19/5).

Menurut Wawan, pasangan calon kepala daerah sudah tidak lagi diperbolehkan melakukan kampanye pada masa Pemilihan Kepala Daerah 2017 dan KPU di daerah memiliki tugas untuk melaksanakan kampanye.

KPU Kota Yogyakarta sudah

menyiapkan beberapa jenis kampanye untuk tiap pasangan calon kepala daerah yaitu dalam bentuk alat peraga, penyediaan bahan kampanye, iklan dan debat.

Meskipun sudah memberikan fasilitasi kampanye, namun KPU Kota Yogyakarta akan tetap menindaklanjutinya dengan sosialisasi mengenai seluruh pasangan calon kepala daerah agar lebih dikenal masyarakat.

"Tidak diperbolehkannya pasangan calon untuk menggelar kampanye justru akan membuat setiap pasangan calon bersikap lebih kreatif untuk memperkenalkan dirinya ke masyarakat," katanya.

Wawan juga menyebut, larangan tersebut justru akan lebih adil untuk setiap pasangan calon kepala daerah seiring dengan diberlakukannya pembatasan dana kampanye.

Pemerintah Kota Yogyakarta

menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana kebutuhan penyelenggaraan Pilkada, Kamis (19/5). Seluruh dana pilkada akan langsung dicairkan dan KPU Kota Yogyakarta bisa langsung menggunakannya. "Pada tahap awal, kami akan membentuk badan ad hoc. Harapannya, seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada bisa berjalan dengan lancar," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan sudah tidak ada keraguan lagi bahwa Pilkada 2017 bisa diselenggarakan setelah NPHD ditetapkan sebelum batas akhir penetapan, 22 Mei.

"Harapannya, penyelenggaraan pilkada bisa berlangsung aman dan lancar karena selama ini, Yogyakarta selalu menjadi barometer pelaksanaan pemilihan umum di tingkat nasional," katanya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005